

# Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Melakukan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling Melalui Supervisi Akademik

Aspandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toboali

---

## Info Artikel :

Diterima 27 Juni, 2022

Direvisi 28 Agustus, 2022

Dipublikasikan 16 September 2022

---

## Kata Kunci:

Kompetensi

Guru BK

Supervisi

---

## ABSTRAK ( 9PT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik dalam upaya meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang terselesaikan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan dalam dua siklus yang melibatkan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Toboali dengan indikator keberhasilan >90.0. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi dapat meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author.

---

## Koresponden:

Aspandi,

Email: [aspandisma1toboali@gmail.com](mailto:aspandisma1toboali@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sumberdaya manusia adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran di sekolah (Kamaluddin, 2011; Wijaya, Sudjimat, Nyoto, & Malang, 2016). Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi atau syarat-syarat esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Selain pengawas sekolah dari dinas pendidikan, kepala sekolah juga merupakan supervisor bagi para guru dan pegawai lain yang ada di sekolahnya (Rachmawati, 2016; Tarhid, 2017). Kepala sekolah disamping harus bertanggung jawab dalam kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah sehari-hari sebagai wujud perannya selaku administrator, juga bertanggung jawab mengawasi, membina dan memotivasi kinerja para guru dan tenaga kependidikanlainya selaku supervisor dan dituntut menguasai kompetensi dalam pelaksanaan tupoksinya.

Sejak dahulu diketahui bahwa pendidik dituntut untuk semakin profesional. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang pendidikan bahwa setiap pendidikan diharapkan lebih berkompotensi sehingga lebih profesional dalam menjalankan tugas pendidik. Dengan dicantumkannya konselor sebagai salah satu tenaga pendidik pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 1 butir 6, diketahui bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”, kalimat tersebut merupakan salah satu indikator bahwa konselor yang selanjutnya dalam artikel ini akan disebut sebagai guru BK sebagai salah satu profesi yang kiprahnya mulai diterima masyarakat dan pemerintah (Undang-Undang, 2003). Oleh karena itu, tonggak yang bersejarah ini harus dimanfaatkan dan dijadikan landasan kuat dalam melakukan evaluasi diri sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang profesional.

Berkenaan dengan peranan guru BK di sekolah, maka dibutuhkan kompetensi yang memadai dari seorang guru BK sehingga peranan konselor di sekolah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sementara rumusan kompetensi konselor dikelompokkan dalam empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi konselor

tersebut seyogyanya diaplikasikan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga pelayanan konseling dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Sukardi dan Kusmawati (2008) citra bimbingan dan konseling semakin diperburuk dengan masih adanya konselor sekolah yang kinerjanya tidak profesional. Mereka masih lemah dalam: 1) memahami konsep-konsep bimbingan secara komprehensif, 2) menyusun program bimbingan dan konseling, 3) mengimplementasikan teknik-teknik bimbingan dan konseling, 4) kemampuan berkolaborasi dengan pimpinan sekolah atau guru mata pelajaran, 5) mengelola bimbingan dan konseling, 6) mengevaluasi program (proses dan hasil) bimbingan dan konseling, dan 7) melakukan tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi untuk perbaikan atau pengembangan program.

Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah terdapat berbagai komponen seperti yang telah diuraikan di atas, namun dari keseluruhan komponen tersebut, ada salah satu komponen yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling. Sebagaimana halnya kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain di sekolah seperti kegiatan belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu harus dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan dari layanan bimbingan dan konseling tersebut sudah tercapai dengan maksimal.

Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra, (2015) diketahui bahwa masih kurangnya kemampuan guru BK di sekolah yang secara sistematis mengevaluasi layanan konseling. Kemampuan guru BK merupakan faktor penting dalam mengevaluasi proses maupun hasil dari kegiatan bimbingan dan konseling. Guru BK harus melakukan evaluasi layanan bimbingan dan konseling secara sistematis.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru BK dalam melakukan evaluasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan supervisi oleh kepala sekolah. Sebagaimana dalam bukunya Gysbers & Henderson (2001) mengatakan bahwa supervisi merupakan sarana yang efektif untuk mengembangkan kompetensi profesional konselor di sekolah.

## Metode

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian tindakan, yaitu Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Prosedur penelitian meliputi kegiatan sebelum pelaksanaan PTS berupa refleksi awal dan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah dilanjutkan dengan pelaksanaan PTS sebanyak dua siklus.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Siklus I

##### i. Perencanaan

Pada tahap perencanaan meliputi : menentukan rencana pelaksanaan supervisi, membuat instrumen supervisi yang dalam hal ini adalah angket evaluasi diri

##### ii. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan oleh guru BK.

##### iii. Pengamatan

Pada tahap pengamatan, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen evaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling yang seharusnya sesuai dengan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK).

##### iv. Refleksi

Dari pemberian angket evaluasi diri dan studi dokumentasi kompetensi konselor dalam mengevaluasi proses dan mengevaluasi hasil, diperoleh hasil bahwa :

- 1) Kompetensi Konselor dalam Mengevaluasi Proses Bimbingan dan Konseling. Guru BK masih kurang dalam tahap Melakukan Evaluasi proses dan penyesuaian proses pelayanan BK di Sekolah.
- 2) Kompetensi Konselor dalam Mengevaluasi Hasil Bimbingan dan Konseling  
Guru BK sudah baik dalam melakukan evaluasi hasil, analisis, serta Interpretasi hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Namun masih kurang dalam tahapan menginformasikan dan penggunaan hasil pelaksanaan evaluasi

layanan BK untuk merevisi dan mengembangkan program BK yang telah disusun

### Refleksi Siklus I

#### b. Siklus II

##### i. Perencanaan

Pada tahap perencanaan meliputi : menentukan rencana pelaksanaan supervisi, membuat instrumen supervisi yang dalam hal ini adalah angket evaluasi diri

##### ii. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan oleh guru BK.

##### iii. Pengamatan

Pada tahap pengamatan, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen evaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling yang seharusnya sesuai dengan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK).

##### iv. Refleksi

Dari pemberian angket evaluasi diri dan studi dokumentasi kompetensi konselor dalam mengevaluasi proses dan mengevaluasi hasil, diperoleh hasil bahwa :

- 1) Kompetensi Konselor dalam Mengevaluasi Proses Bimbingan dan Konseling. Guru BK sudah mampu dalam tahap Melakukan Evaluasi proses dan penyesuaian proses pelayanan BK di Sekolah.
- 2) Kompetensi Konselor dalam Mengevaluasi Hasil Bimbingan dan Konseling. Guru BK sudah baik dan mampu dalam melakukan evaluasi hasil, analisis, Interpretasi hasil, menginformasikan dan penggunaan hasil pelaksanaan evaluasi layanan BK untuk merevisi dan mengembangkan program BK yang telah disusun.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kompetensi konselor dalam melakukan evaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jika dilihat dari Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Nasional, maka seorang konselor harus melakukan evaluasi hasil bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, serta menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.

Penilaian terhadap hasil lebih menekankan pada pengumpulan data atau informasi mengenai keberhasilan dan pengaruh kegiatan layanan bimbingan yang telah diberikan. Dengan kata lain, evaluasi terhadap hasil ditujukan pada pencapaian tujuan program, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Penilaian jangka pendek yaitu penilaian yang batas waktunya tertentu, sekitar satu minggu sampai satu bulan, namun, penilaian jangka panjang yaitu penilaian yang batas waktunya sekitar satu bulan sampai dengan satu semester. Dengan melakukan evaluasi, konselor dapat bekerja lebih efektif dengan lebih fokus pada upaya pencegahan dan intervensi yang telah terbukti efektif. Selain daripada itu, seorang konselor yang melaksanakan evaluasi layanan bimbingan dan konseling akan membantu konselor dalam menginformasikan praktik dan meningkatkan pelayanan konseling.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi dapat meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangatlah berpengaruh, hal ini dapat dilihat dari perencanaan, jika perencanaannya baik, maka pelaksanaannya juga baik, dan proses evaluasinya juga baik pula. Namun, semua komponen itu didukung oleh kompetensi konselor yang mumpuni.

---

## Referensi

- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2001). Comprehensive guidance and counseling programs: A rich history and a bright future. *Professional School Counseling, 4*(4), 246.
- Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan konseling sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 17*(4), 447–454.
- Nasional, D. P. (2008). Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Jakarta: nomor.
- Rachmawati, T. (2016). Supervisi pendidikan sebagai upaya meningkatkan kinerja guru. *Coopetition, 7*(1), 43.
- Saputra, W. N. E. (2015). Evaluasi Program Konseling di SMP Kota Malang: Discrepancy Model. *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling Vol, 1*(2).
- Sukardi, D. K., & Kusmawati, D. P. E. N. (2008). Proses bimbingan dan konseling di sekolah: untuk memperoleh angka kredit. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Tarhid, T. (2017). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Kependidikan, 5*(2), 141–155.
- Undang-Undang, R. I. (2003). no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Bandung: Citra Umbara*.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., Nyoto, A., & Malang, U. N. (2016). Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika* (Vol. 1, pp. 263–278).